



## PENETAPAN

Nomor 904/Pdt.P/2022/PA.Bdw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut  
dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Ainul Yakin bin Towari**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 10 April 1999,  
NIK 3511151004990001, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
Petani, tempat kediaman di RT. 16 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan  
Cermee Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

**Yuliati Hasari binti Morahmat**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 02 Maret  
1998, NIK 3511154203980006, Agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 16 RW. 0 Desa Bajuran  
Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II;  
Yang selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-  
saksinya di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya  
tanggal 25 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Bondowoso dengan register Nomor 904/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 25  
Oktober 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada  
Rabu, 17 Oktober 2018 di RT. 16 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee  
Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II  
bernama Morahmat dengan mahar berupa Cincin Emas 2 gram sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- munakihnya (yang mengawinkan) adalah Nasur dan dengan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain Suniwen dan Sukarwi;
2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I Jejaka dan status Pemohon II Perawan;
  3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama Kanzul Atiyah, Bondowoso, 05 April 2020;
  4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
  5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;
  6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ;
  7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Rabu, 17 Oktober 2018 di RT. 16 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Bondowoso telah mengumumkan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bondowoso dan lembaga penyiaran Radio Mahardika Bondowoso;

Hal. 2 dari 9 Pen Nomor 904/Pdt.P/2022/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Ainul Yakin bin Towari) NIK : 3511151004990001 tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Yuliati Hasari binti Morahmat) NIK : 3511154203980006 tanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Ainul Yakin bin Towari Nomor : 3511151101220004 tanggal 11 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Nomor B-280/Kua.13.06.16/Pw.01/10/2022 tanggal 04 Oktober 2022, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

Hal. 3 dari 9 Pen Nomor 904/Pdt.P/2022/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Abda bin Buhar, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Guluk RT. 11 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di RT. 16 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso dengan wali para Pemohon bernama Morahmat mas kawin berupa Cincin Emas 2 gram dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi, yaitu Suniwen dan Sukarwi;
  - Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut karena menjadi saksi pada waktu itu;
  - Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah Jejaka, sedang Pemohon II Perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Kanzul Atiyah, Bondowoso, 05 April 2020;
  - Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
  - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
2. Mathari bin Harima, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Kumbala RT. 14 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, yang di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Pen Nomor 904/Pdt.P/2022/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon I;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri telah menikah di RT. 16 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso dengan wali para Pemohon bernama Morahmat mas kawin berupa Cincin Emas 2 gram dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi, yaitu Suniwen dan Sukarwi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut karena saksi ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah Jejaka, sedang Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Kanzul Atiyah, Bondowoso, 05 April 2020;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Hakim secara keseluruhan.

## PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 9 Pen Nomor 904/Pdt.P/2022/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah karena pernikahannya yang dilangsungkan secara Islam pada Rabu, 17 Oktober 2018 di RT. 16 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso sebagai bukti adanya pernikahan dan guna kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 yang berupa Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan para Pemohon telah hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 yang berupa Surat Keterangan dari KUA setempat, maka harus dinyatakan terbukti

Hal. 6 dari 9 Pen Nomor 904/Pdt.P/2022/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama Abda bin Buhar dan Mathari bin Harima yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di RT. 16 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso dengan wali para Pemohon bernama Morahmat mas kawin berupa Cincin Emas 2 gram dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi, yaitu Suniwen dan Sukarwi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersifat sementara maupun halangan yang bersifat permanen;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama terhitung dalam satu keluarga dan selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Kanzul Atiyah, Bondowoso, 05 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal Rabu, 17 Oktober 2018 di RT. 16 RW. 0 Desa Bajuran Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI;

Hal. 7 dari 9 Pen Nomor 904/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi;

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم بفصل وصدقته المرأة أو المجرى

*Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ainul Yakin bin Towari) dengan Pemohon II (Yuliati Hasari binti Morahmat) yang dilangsungkan

Hal. 8 dari 9 Pen Nomor 904/Pdt.P/2022/PA.Bdw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal Rabu, 17 Oktober 2018 di RT. 16 RW. 0 Desa Bajuran  
Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini tetapkan di Bondowoso dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp 400.000,00
Biaya Pengumuman Radio	: Rp 70.000,00
Biaya PNBPN	: Rp 30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 625.000,00

Hal. 9 dari 9 Pen Nomor 904/Pdt.P/2022/PA.Bdw